

MENGAPA MENAIKKAN PAJAK?

Kenaikan pajak sempat menghangatkan keadaan politik negeri ini. Kehebohan ini dipicu oleh pemberitaan media. Awalnya adalah penjelasan pemerintah bahwa pendapatan pemerintah dari pajak ditetapkan naik 20 persen. Penetapan kenaikan pendapatan ini berhubungan langsung dengan rencana anggaran pemerintah. Kebutuhan dana untuk anggaran belanja negara untuk tahun fiskal sekarang (2002-2003) besarnya USD 202,2 juta. Sementara pendapatan berupa Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae (CFET) dari PBB besarnya hanya USD 41,3 juta. Kekurangannya sebesar USD 160,7 juta harus dicarikan dari negara-negara donor maupun dari pajak.

Masalah muncul ketika surat kabar memuat komentar dan berita yang menyebutkan bahwa pajak naik menjadi 20%. Banyak orang, termasuk para anggota parlemen, ekonom dan komentator lainnya yang menyatakan penentangan.

"Harga barang-barang kebutuhan pokok akan naik dan rakyat tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya karena barang-barang tersebut kebanyakan diimpor dari luar", demikian komentar pihak-pihak yang tidak setuju. Maklum pendapatan pemerintah dari sektor pajak itu yang terbesar adalah dari pajak impor. Selain itu, ada yang menyebutkan bahwa tingginya pajak akan membuat para pengusaha asing tidak mau melakukan investasi di Timor Lorosae.

Pihak-pihak yang tidak setuju menjadi seperti berada di atas angin ketika Presiden RDTL Xanana Gusmão menyatakan tidak setuju pada regulasi pajak yang telah disetujui Parlemen Nasional. Padahal, menurut Kongsitusi RDTL, yang berwenang mengesahkan undang-undang di negara ini adalah Presiden RDTL. Ketidaksetujuan Presiden Xanana Gusmão berarti veto terhadap regulasi tersebut.

Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran. Regulasi mengenai anggaran belanja negara telah disetujui oleh Presiden, tetapi Presiden menolak regulasi tentang pajak. "Anggaran belanja negara didasarkan pada asumsi tentang terjadinya kenaikan pendapatan dari pajak. Kalau regulasi tentang pajak ditolak oleh Presiden, bagaimana pemerintah menjalankan programnya?" kata anggota Parlemen Nasional, Adalgiza Magno kepada *Cidadaun*.

Sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik, kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah itu bukan menjadikan pajak besarnya 20%. Pajak umumnya naik sebesar 1-2 persen. Misalnya saja pajak impor naik dari 5% menjadi 6% dan pajak penjualan naik dari 5% menjadi 6%. Dengan kenaikan seperti itu, pendapatan pemerintah dari pajak memang naik sebesar 20 persen. Tetapi besarnya pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tidak menjadi 20 persen.

Pajak Naik Berapa?

(BACA HAL. 4)

Chico Mau-Lohi

(BACA HAL. 5)

Investasi Didominasi Perdagangan

(BACA HAL. 7)

Beras impor dari berbagai negara: pajak naik, harga beras naik? Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Tidak mengherankan kalau Sekretaris Negara Urusan Perdagangan dan Industri Arlindo Rangel da Cruz menuduh pihak oposisi dalam Parlemen Nasional menafsirkan kenaikan pajak secara salah. "Kenaikan pajak ini bukan dimanfaatkan oleh pengusaha, tetapi dimanfaatkan oleh pihak oposisi. Mereka yang membesarkan isu itu untuk menjatuhkan lawan politik," katanya kepada Nuno Hanjan dan Rogério Soares dari *Cidadaun*. Ia menyebutkan bukti bahwa harga-harga barang tidak naik, setelah munculnya keputusan pemerintah menaikkan pajak.

Meskipun begitu, pendapat Rektor Universitas Dili Dr. Lucas da Costa perlu kita perhatikan. Menurutnya, sebaiknya pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan (pajak atas keuntungan hasil usaha) bukan pajak pendapatan (yang dikenakan pada gaji). Untuk itu, pemerintah harus punya kemampuan untuk memantau perusahaan-peru-

sahaan yang beroperasi di Timor Lorosae dan siklus bisnis masing-masing perusahaan.

Selain itu, masih menurut Lucas da Costa, pemerintah punya sumber pendapatan lain. "Sebenarnya pemerintah bisa membentuk badan-badan usaha milik negara untuk bisnis strategis, seperti telekomunikasi, distribusi bahan pangan, distribusi bahan bakar, dan sebagainya. Dengan cara itu Timor Lorosae bisa menciptakan pendapatan yang aman, dengan biaya sedikit, dan risiko yang sangat kecil," katanya dalam suatu diskusi dengan redaksi *Cidadaun*.

Namun, lanjut doktor ekonomi ini, pemerintah bukan membentuk badan usaha itu malah memberikan bisnis strategis kepada perusahaan-perusahaan swasta asing. "Tampaknya kebanyakan orang dalam pemerintahan sudah terbius oleh pemikiran yang dibawa oleh Bank Pembangunan Asia, IMF, dan Bank Dunia," katanya. ●

Kewajiban Pemerintah kepada Warganegara

Pajak adalah salah satu sumber keuangan bagi negara modern. Dengan pajak, negara bisa membiayai pelayanan umum yang sangat diperlukan oleh rakyat, seperti pelayanan kesehatan, penyediaan sekolah, penyediaan listrik dan air bersih, pembangunan jalan, dan sebagainya. Bayangkan kalau pelayanan seperti itu diserahkan kepada perusahaan swasta. Akan banyak orang yang tidak bisa menikmatinya, karena harganya akan sangat tinggi. Di mana-mana perusahaan swasta didirikan untuk mengeruk keuntungan, bukan untuk melayani rakyat!

Selain itu, pajak juga merupakan salah satu sarana untuk redistribusi (atau pemerataan) pendapatan dalam masyarakat. Dengan menarik pajak dari golongan yang berpenghasilan tinggi, uang yang diperoleh bisa disalurkan ke golongan yang miskin melalui program-program pembangunan, termasuk pembangunan pelayanan umum.

Pajak juga memperkuat hubungan antara warganegara dengan negaranya. Dengan membayar pajak, warganegara menjadi memiliki ikatan nyata dengan negaranya, karena negara itu dibiayai dengan uang milik warganegara yang diberikan kepada negara dalam bentuk pajak. Warganegara memiliki kekuatan untuk menuntut pemerintah – yang menjalankan kekuasaan negara – agar bekerja sesuai dengan keinginan warganegara. Meskipun pada kenyataannya – bahkan di negara yang paling demokratispun – pemerintah bisa mengabaikan keinginan-keinginan warganegaranya.

Fungsi-fungsi pajak tersebut ada dalam teori modern tentang pajak, yang dianggap ada dalam negara modern demokratis. Masalahnya, pengalaman rakyat di mana-mana dengan pajak itu jauh lebih panjang daripada yang disebut teori modern tersebut. Misalnya, di Timor Loro-sae, rakyat telah mengalami pungutan seperti pajak berupa upeti kepada penguasa tradisional pribumi, dan pajak kepala (*imposto de capitação*) yang harus dibayar oleh setiap laki-laki dewasa kepada pemerintah kolonial Portugis. Pengalaman panjang ini diperlihatkan oleh sebutan sistem perpajakan dalam bahasa Portugis, yakni *sistema tributário*, yang terjemahan harafiahnya adalah “sistem penarikan upeti”!

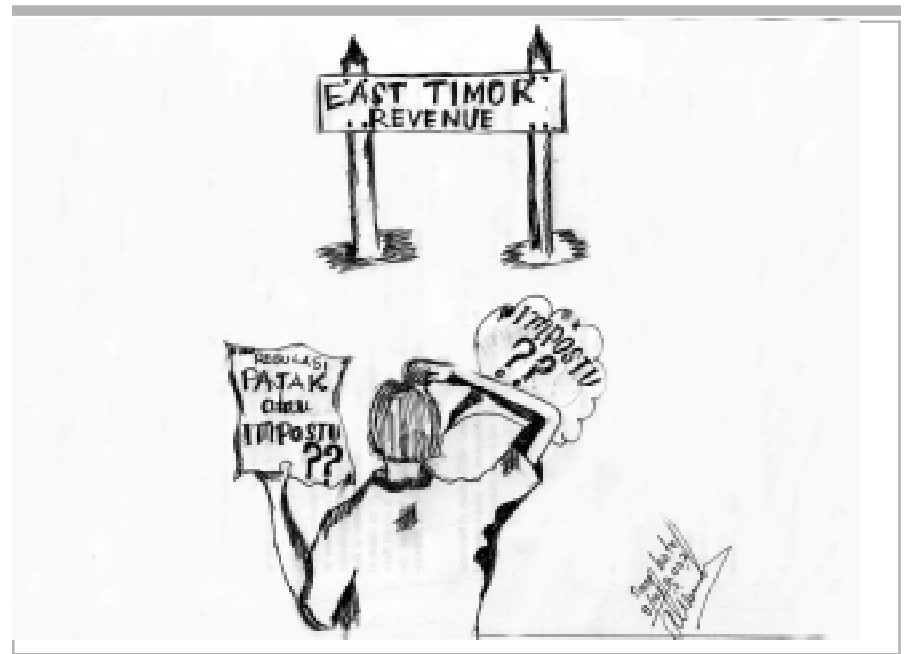
Jadi, pengalaman rakyat dengan pajak itu bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Bagi rakyat, membayar upeti adalah kewajiban yang harus dilakukan tanpa adanya hak yang ditimbulkan akibat kewajiban tersebut. Demikian pula *imposto* Portugis. Rakyat harus membayarnya, kalau tidak mereka harus melakukan kerja paksa untuk pemerintah. Sama

dengan upeti, pembayaran *imposto* kepada pemerintah kolonial Portugis tidak menimbulkan hak yang berlaku dalam negara modern demokratis, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan umum dan hak untuk ikut pemilu.

Pengalaman buruk ini sebenarnya sebagian saja dari pengalaman rakyat dengan negara. Dalam sejarah Timor Loro-sae, negara dialami rakyat kecil sebagai kekuasaan dari luar yang memaksa rakyat, tanpa memberikan imbalan kebaikan. Negara kolonial Portugis kejam

menindas rakyat dan tidak banyak berbuat untuk memajukan kehidupan rakyat. Sementara negara penduduk Indonesia, meskipun mengalirkan banyak uang untuk “pembangunan,” sangat kejam menindas rakyat.

Karena pengalaman tersebut, negara merdeka Republik Demokratik Timor Leste mau tak mau harus mampu membuktikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Pemerintah – yang adalah *pelaksana* negara – harus bekerja keras untuk itu, kalau tidak ia akan kehilangan legitimasi. * Cidadaun



Julino Ximenes/Cidadaun

Opini

Negara Merdeka, Warganegara Bebas Pajak?



• Douglas Kammen

Dosen tamu pada Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Nasional Timor Loro-sae, Dili

Selama beberapa bulan kenaikan pajak ramai dibicarakan dan dimuat di media. Entah dari mana, ada berita bahwa pajak untuk barang impor dinaikkan 20%, sehingga harga barang ikut naik. Untuk membuktikan musibah yang melanda masyarakat, beberapa media malah memuat berita tentang kenaikan harga barang lebih dari 20%!

Lucunya, berita itu simpang-siur. Alasan pertama, Parlemen baru selesai merancang proposal perubahan sistem perpajakan, tetapi proposalnya belum disetujui oleh Presiden, sehingga belum berlaku. Alasan kedua berkaitan dengan jumlah kenaikan pajak. Menurut informasi yang beredar, pajak akan dinaikkan 20%. Kalau sebelumnya pajak barang impor adalah 10%, dengan kenaikan 20% pajak menjadi 30%. Tetapi itu tidak betul. Menurut proposal perubahan perpajakan pajak barang impor akan dinaikkan 20% dari jumlah pajak sebelumnya, berarti dari 10% menjadi 12%. Sama juga untuk pajak pelayanan.

Mengapa terjadi kesalahpahaman? Dari satu sisi, pemerintah membuat pengumuman bahwa dengan kenaikan pajak tersebut pendapatan pemerintah akan naik 20% dari jumlah sebelumnya. Betul. Tetapi tidak berarti jumlah pajak naik 20%! Dari sisi kedua, media masa hanya mengutip protes dari berbagai pihak (terutama oposisi politik), tanpa menjelaskan isi proposalnya.

Tetapi sudah terlanjur. Harga barang mulai naik, dan masyarakat resah. Te-

tapi mengapa? Apakah protes itu berarti masyarakat TL tidak rela untuk membayar pajak? Pada bulan Juli saya bertanya kepada mahasiswa di UNTL apakah mereka lebih suka bisa membeli barang dengan harga murah atau lebih suka pemerintah bisa menaikkan pendapatan agar bisa meningkatkan pelayanan sosial. Jawabnya mutlak: KITA PILIH BARANG MURAH!

Itu bukan sekedar jawaban anak muda yang egois, tetapi didasarkan sejarah Timor Leste sendiri. Awal abad ke-20, pemerintah Portugis menentukan *imposto* untuk semua laki-laki di atas umur 18. Alasan resmi supaya pemerintah di Timor bisa lebih mandiri, alias tidak akan merugikan kas negara Portugal. Tetapi di belakang itu ada alasan kedua. Dengan pembukaan perkebunan kopi pada abad ke-19, para tuan tanah (baik SAPT maupun pihak swasta) mengalami kekurangan buruh tani untuk memetik kopi. Dengan pemberlakuan *imposto* laki-laki pribumi terpaksa mencari pekerjaan upah, dan para tuan tanah akan mendapatkan buruh tani! Di berbagai distrik masyarakat menolak, dan ada yang berani berontak.

Pada jaman Indonesia lain lagi. Ketika menyerang Timor Leste, Jakarta sedang mengalami keuntungan luar biasa dari kenaikan harga minyak sedunia, sehingga tidak perlu mementingkan pajak. Dengan kemelut ekonomi awal 1980-an, Jakarta mulai memungut segala macam pajak dari warganegaranya.

Walaupun pajak-pajak baru juga berlaku di “propinsi” ke-27, untuk alasan politis sering tidak dilaksanakan sepenuhnya. Malah, pengalaman selama jaman pahit Indonesia adalah banyak pelayanan masyarakat (pembersihan kota, kesehatan, dll.) tanpa beban pajak!

Dua warisan sejarah ini mempengaruhi tanggapan masyarakat terhadap pajak sesudah Timor Leste merdeka. Awal tahun ini saya mewawancarai seorang kakek berumur 80 tahun di Quelicai. Menurutnya, tahun 1975 dia ikut Fretilin karena mau merdeka. Tapi waktu ditanya apa artinya “merdeka,” dia menjawab “tidak membayar imposto”! Lalu saya bertanya apakah setelah Timor Leste akhirnya merdeka, dia mau membayar pajak? Dia tidak menjawab.

Ada baiknya kita ingat tiga fungsi klasik negara pada awal jaman modern (abad ke-17-19). Pertama, memaksa pemuda untuk bertugas di militer; kedua, memberantas pemberontakan; ketiga, memungut pajak. Pada abad ke-20, urutannya mungkin terbalik. Dengan perkembangan administratif, nasionalisme, dan aliansi keamanan, pada jaman sekarang wajib militer dan pemberantasan pemberontakan menjadi hal kedua. Dengan tuntutan masyarakat untuk pelayanan sosial, setiap negara terpaksa meningkatkan pendapatan. Solusi utama: pajak.

Tetapi jangan keliru. Di negara-negara kaya rakyat tidak membayar pajak dengan rela karena nasionalisme tinggi. Tidak. Sebagai warganegara Amerika, saya membayar pajak karena merasa takut. Takut kepada sanksi hukum. Dan mau tak mau, rakyat Timor akan belajar merasa takut kepada negara sendiri juga. Para penguasa seharusnya menjelaskan kenaikan pajak dan media massa memuat informasi secara jelas. ●



Kakek dan cucu, Manatuto. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Pajak Pendapatan itu Wajar



Para guruSLTP sehabis mengikuti trening HAM di Maubisse. Foto: Jaime Soares/Cidadaun

Negara membutuhkan dana untuk membiayai kehidupannya. Untuk itu salah satu sumber dana atau anggaran pemerintah salah satunya dari pajak. Tetapi kebanyakan masyarakatan yang mempunyai pendapatan menganggap pengenaan pajak ialah hal yang wajar karena setiap negara membutuhkan dana untuk pembangunan.

Negara maupun organisasi membutuhkan dana untuk membiayai kehidupannya. Anggaran negara biasa didapat dari pendapatan dan pinjaman. Pendapatan itu salah satunya berasal dari pajak. Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dengan mewajibkan setiap warganegara untuk membayar.

Yang biasanya disebut pajak itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu retribusi dan pajak. Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Fasilitas ini misalnya tempat parkir, terminal, pasar, dan pelabuhan. Retribusi dikenakan karena negara mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan memperbaiki fasilitas yang digunakan untuk umum.

Pajak dipungut pemerintah tanpa memberikan jasa atau fasilitas secara langsung. Misalnya, pajak barang mewah dikenakan kepada

setiap orang yang membeli barang yang digolongkan sebagai barang mewah. Pajak pendapatan dikenakan kepada orang yang memperoleh gaji dalam jumlah tertentu.

Di Timor Lorosae masa transisi, setiap orang yang berpendapatan 0-100 USD tidak dikenakan pajak, sedang yang berpendapatan USD 101-500 dikenakan pajak 10%. Setelah merdeka, setiap orang yang berpendapatan USD 0-550 dikenai pajak 10%.

Mario Soares, yang bekerja sebagai petugas keamanan, berpendapat bahwa pajak pendapatan itu wajar. "Setiap negara membutuhkan dana untuk pembangunan. Jadi kalau gaji kita dipotong pajak 10% itu wajar. Tetapi pemotongannya harus seimbang," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Marfim Guimares, dosen Fakultas Teknik UNTIL. Menurutnya kenaikan pajak tergantung pada kemam-

puan warganegara. "Bagi yang mempunyai jabatan tinggi tidak menjadi masalah. Tetapi bagi rakyat kecil merupakan beban. Karena itu pemerintah harus menjelaskan kepada rakyat apa saja dan siapa saja yang dikenakan pajak," katanya.

Bagi Marfim Guimares pajak pendapatan 10% itu wajar. "Kalau negara mau maju, negara perlu memungut pajak untuk membiayainya. Jadi wajar kalau gaji kita dikenakan pajak 10%," katanya.

Lain lagi dengan Ana Maria. "Pajak pendapatan itu wajar, tetapi kami yang berpendapatan kecil sangat sulit. Bahan kebutuhan hidup saat ini sangat mahal," katanya. "Gaji kami sekarang ini saja sudah tidak cukup untuk keperluan rumah tangga. Apa lagi kalau dikenakan pajak!" lanjut pengajar Sekolah Dasar Hati Kudus Yesus Becora ini.

Keluhan yang sama juga diung-

kapkan oleh Isac da Conceição. Menurutnya, pengenaan pajak pendapatan merupakan masalah. "Pengenaan pajak 10% pada gaji saya merupakan masalah besar. Karena saat sekarang bahan kebutuhan hidup mahal dan tidak cukup untuk membiayai sekolah anak-anak serta membayar listrik yang sangat mahal," kata bapak yang bekerja sebagai petugas keamanan ini.

Sementara Amadio dos Santos, seorang petani di Maubara mengatakan bahwa dirinya bingung mengapa ada pajak. "Zaman Portugis sering terjadi pemberontakan karena pemerintah memberlakukan pajak. Sekarang setelah merdeka, kok masih ada pajak?" katanya. Menurutnya, pemerintah boleh saja memungut pajak. "Tetapi yang dikenai adalah pengusaha-pengusaha yang mendapatkan keuntungan dari usahanya di Timor Lorosae," katanya. Rogério Soares

Suara Pembaca

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi jembatan untuk pelaku dan korban Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) adalah lembaga yang baik untuk menjembatani antara pihak korban dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Agar mereka bisa hidup bersama kembali melalui rekonsiliasi untuk membangun Timor Lorosae. Rekonsiliasi sangat baik. Tetapi mereka yang terlibat pelanggaran hak asasi manusia harus mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada para korban. Pengakuan atas kesalahan mereka itu perlu dilakukan supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut di masa yang akan datang.

*Mario Marques Cabral
Mahasiswa Fakultas Teknik,
Universitas Nasional Timor
Lorosae*

Mencari fakta pelanggaran hak asasi manusia

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi baik jika berhasil mengungkapkan fakta tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Timor Lorosae. Dengan demikian dapat saya katakan bahwa kehadiran komisi ini sangat dibutuhkan. Hasil yang diperoleh dari pencarian fakta itu bisa dijadikan sebagai pedoman hidup bermasyarakat di masa depan. Supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Lorosae.

*Agui do Carmo
Mahasiswa Universitas Dili*

Untuk mengetahui pelanggaran hak asasi manusia Sebagai masyarakat kecil, menurut saya KPKR rekonsiliasi itu sangat baik. Karena negara kita baru saja merdeka, kita sangat perlu mengetahui pelanggaran hak asasi manusia di bumi Timor Lorosae dan melakukan rekonsiliasi antara kita supaya bisa kembali hidup bersama untuk membangun negara kita.

*Jose Soares
Surikmas, Dili Barat*

KPKR diperlukan untuk menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia KPKR itu sangat penting perannya dalam mencari fakta tentang pelanggaran hak asasi manusia. Saya sebagai rakyat kecil ingin menyampaikan bahwa KPKR dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat guna menghilangkan pelanggaran hak asasi manusia.

*Maria Amaral
Becora, Dili Timur*

Mengembalikan persatuan rakyat KPKR mengembalikan persatuan sesama rakyat Timor Lorosae untuk mencari solusi yang pada akhirnya mencapai persatuan, ketenteraman, dan kedamaian yang tidak mengesampingkan keadilan. Rekonsiliasi dan keadilan adalah harapan yang bisa menjadi kenyataan. Juga merupakan sarana untuk menciptakan kerukunan yang baik antara sesama orang Timor Lorosae.

*Paul Augusto
Becora, Dili Timur*

Dari Redaksi

Sampai sekarang ternyata *Cidadaun* masih belum bisa memenuhi janjinya untuk kembali terbit setiap minggu. Sangat sulit untuk mendapatkan pekerja dengan kemampuan yang cocok. Pertama, karena memang masih jarang orang yang punya kemampuan yang cukup memadai untuk menjadi jurnalis. Kedua, orang yang mempunyai kemampuan itu biasanya sudah bekerja di bidang lain. Malah ada yang awalnya menjadi jurnalis, kemudian pindah profesi. Maklum, media di Timor Lorosae belum bisa memberikan imbalan yang tinggi bagi pekerjaan ini.

Tak berlebihan apa yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Jurnalis Timor Lorosae Virgílio Guterres dalam wawancara dengan Radio Nederland belum lama ini: "Yang bertahan di media adalah orang-orang yang berkomitmen."

Kesulitan yang dihadapi *Cidadaun* sesungguhnya juga dialami semua media cetak yang lain. *Talitakum* dan *Lian Maubere*, dua majalah berita mingguan yang terbit di Dili, sudah beberapa bulan ini tidak terbit mingguan. Sebelumnya, media berita yang terbit di luar Dili, seperti di Same, Maliana, dan Oe-cusse, juga mengalami nasib yang sama. Bahkan ada yang sama sekali tidak terbit lagi.

Media berita sangat diperlukan bagi rakyat, jika kita ingin *ukun rasik an* benar-benar terwujud. Kesempatan partisipasi

politik yang terbuka sekarang tidak akan ada artinya bagi rakyat, jika rakyat tidak memiliki informasi. Tanpa informasi yang baik, rakyat tidak akan bisa menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan memajukan hidup mereka.

Karena itu kesulitan-kesulitan kami anggap sebagai tantangan yang harus dihadapi. Tetapi kita juga harus bersikap realistis. Para pembaca, izinkan kami mengubah waktu terbit tabloid ini dari mingguan menjadi bulanan. Kami harap para pembaca maklum. ●

Pffuiii!

Setelah Timor Lorosae resmi merdeka, listrik masih saja sering padam.

Satu lagi bukti bahwa pemerintah transisi UNTAET tidak berhasil menjalankan mandatnya.

Banyak yang mendirikan perguruan tinggi, baik di Dili maupun di distrik lain, seperti Baucau dan Same.

Karena tingginya minat untuk meningkatkan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan ataukah karena keinginan besar menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis?

Kenaikan Pajak

Memberatkan masyarakat?

Kenaikan pajak disebut-sebut menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Seberapaakah kenaikan yang benar-benar terjadi?



Pedagang bahan kebutuhan sehari-hari di Mercado Comoro, Dili. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Sejak diumumkan kenaikan pajak, tidak hanya pedagang dan produsen yang mempersoalkan tetapi anggota Parlemen Nasional pun ramai-ramai mempersoalkannya. Presiden Xanana bahkan membatalkan undang-undang pajak yang telah disetujui Parlemen. Meskipun akhirnya disetujui untuk diberlakukan, tetapi persoalan tersebut sempat menjadi pembicaraan hangat di mana-mana.

Tadio Viana, seorang warga Dili yang sehari-harinya berjualan di Mercado Comoro, ketika ditemui *Cidadaun*, mengatakan bahwa harga barang-barang memang naik setelah penyerahan kedaulatan. "Harga barang naik, menurut para distributor karena dolar Amerika turun

terhadap rupiah dan karena kenaikan pajak barang impor," katanya kepada *Cidadaun*.

Namun, kenaikan itu tidak begitu mencolok. Misalnya harga beras pada awal transisi Rp 110.000 untuk satu sak 50kg (saat itu kurs rupiah terhadap dolar adalah Rp 10.000 untuk USD 1), sekarang USD 14. Dengan kurs yang berlaku sekarang, yaitu USD 1 = Rp 8000, maka kenaikan ini sangat kecil. Harga satu sak beras tersebut adalah USD 14 x Rp 8.000 = Rp 112.000.

Naiknya harga barang juga diakui oleh Wakil Komisaris Perpajakan, Jose Eduardo Quintao. Namun menurutnya tidak semua kenaikan itu disebabkan oleh pajak. Karena pajak yang

tinggi hanya dikenakan pada barang mewah, bukan barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras. Menurutnya banyak orang keliru memahami besarnya kenaikan pajak yang diumumkan pemerintah. "Kenaikan itu sebetulnya merupakan akumulasi dari kenaikan sebelumnya. Kenaikan yang sesungguhnya hanya antara satu hingga dua persen," katanya.

Terjadinya kenaikan harga barang karena pajak dibantah oleh Sekretaris Negara Urusan Perdagangan dan Industri Arlindo Rangel. Menurutnya kenaikan barang terjadi karena spekulasi. "Kami pernah melakukan pengamatan dan mendapatkan barang yang naik sampai 500%. Ini tidak masuk akal, ka-

tanya kepada *Cidadaun*. Untuk mencegah agar hal seperti ini tidak terulang, pihaknya akan memberlakukan kontrol harga, yaitu dengan membatasi tingkat keuntungan untuk setiap barang. "Dengan demikian orang tidak bisa menaikkan barang melebihi tingkat keuntungan yang telah ditetapkan. Jika melanggar ketentuan ini akan didenda," tegasnya. Menurutnya, kebijakan seperti ini ditentang oleh IMF dan Bank Dunia yang menginginkan Timor Lorosae masuk WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). WTO memang memberlakukan perdagangan bebas untuk semua anggotanya dan melarang kontrol harga dalam bentuk apapun. ● **Julino Ximenes**

Pajak Naik Berapa?



Barang impor peralatan rumah tangga. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Anggapan bahwa pajak di Timor Lorosae besarnya 20 persen benar-benar tidak ada dasarnya. Ringkasan perubahan sistem perpajakan yang diperoleh *Cidadaun* dari Parlemen Nasional memperlihatkan hal ini. Dalam lembaran berjudul yang berjudul "Sumário das Mudanças, Lei de Modificação do Sistema Tributário 2002" yang agaknya dikeluarkan oleh Serviço de Receitas Timor Leste (Dinas Pendapatan Timor Leste) ini disebutkan bahwa mulai 1 Juli 2002 berlaku perubahan pajak. Dalam perubahan ini pajak dinaikkan antara 1-2%.

Pajak impor naik dari 5% menjadi 6%. Ini berarti misalnya, jika Anda mengimpor barang seharga USD 1000 maka kantor Border Service akan memungut pajak sebesar USD 60, yang dulunya cuma USD 50.

Pajak pelayanan yang sebelumnya besarnya 10%, naik menjadi 12%. Pajak pelayanan dikenakan atas penggunaan suatu jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan jasa. Misalnya Anda makan di rumah makan. Harga makanan yang Anda pesan USD 15. Menurut peraturan lama, Anda dikenai pajak 10%, berarti USD 1,50. Jadi, kepada rumah makan tersebut Anda harus membayar USD 16,50. Dengan ketentuan baru, pajak pelayanan menjadi 12%, yang berarti Anda harus membayar pajak USD 1,80. Jadi yang harus Anda bayar kepada rumah makan adalah USD 16,80. Pajak yang dipungut dari Anda, oleh rumah makan tersebut kemudian dibayarkan kepada Dinas Pendapatan Timor Leste.

Pajak lain yang diatur dalam ketentuan baru adalah pajak

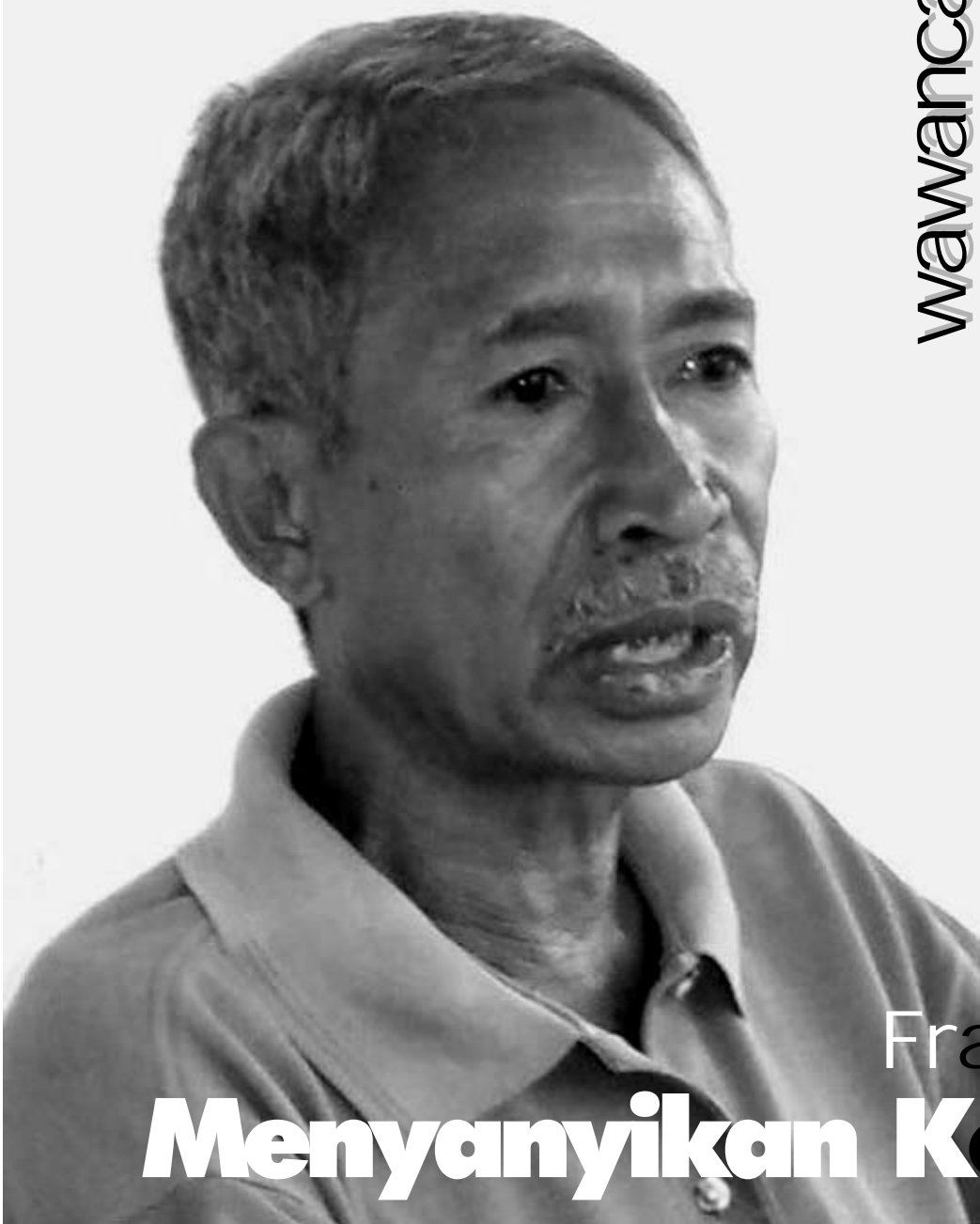
penjualan. Kenaikannya adalah dari 5% menjadi 6%.

Ada kenaikan pajak yang perhitungannya sedikit rumit, yaitu untuk pajak pendapatan. Pajak ini dikenakan atas gaji yang diperoleh seseorang. Menurut ketentuan lama, orang yang berpendapatan USD 0-100 tidak terkena pajak. Pajak untuk pendapatan USD 101-650 besarnya adalah 10%. Sedang untuk penghasilan di atas USD 650 pajaknya adalah 30%. Dalam ketentuan baru, penggolongannya berbeda. Untuk pendapatan sebesar USD 0-550 pajaknya 10%, Sedang bagi yang berpendapatan di atas USD 550, pajaknya adalah USD 55 ditambah 30% dari jumlah selebihnya. Misalnya Anda berpendapatan sebelumnya USD 700 maka Anda dikenai pajak sebesar USD 55 ditambah 30% dari USD 150

(berarti USD 45), jadi pajak yang harus dibayar untuk bulan bersangkutan besarnya USD 100.

Kalau menurut ketentuan lama, pajak yang harus Anda bayarkan adalah 30%, yaitu USD 210. Dengan perubahan ini malah terjadi penurunan pajak untuk golongan orang yang berpendapatan tinggi. Sementara untuk orang golongan pendapatan rendah, yang sebelumnya tidak terkena pajak yaitu yang berpendapatan USD 0-100 dalam ketentuan baru justru terkena pajak, yaitu digolongkan sama dengan orang yang berpendapatan sampai USD 550 (pajak 10%). Bisa dibilang bahwa ketentuan pajak pendapatan meringankan yang golongan berpendapatan tinggi dan memberatkan golongan yang berpendapatan rendah. ●

Nug Katjasungkana



Francisco de Jesus Brito Menyanyikan Keinginan Rakyat

Francisco de Jesus Brito, dikenal di seluruh Timor Lorosae dengan nama Chico Mau-Lohi. Penyanyi koremetan ini dilahirkan di Dili, 25 Desember 1948 dari pasangan Ana dan Francisco da Silva Brito. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Lahane, Dili tahun 1967, anak pertama dari empat bersaudara ini melanjutkan pendidikan pada sekolah menengah di Balide yang dibuka oleh orang yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Demokratik Timor Leste, Francisco Xavier do Amaral. Penyanyi kelompok legendaris Cinco de Oriente pada 1960-an hingga invasi Indonesia 1975 ini sekarang ia adalah koordinator grup musik terkenal Estrela do Mar. Ikuti wawancara berikut dengan Rogério Soares dan Nuno Hanjan dari Cidadaun.

Sejak kapan anda terjun dalam dunia musik?

Saya menyukai musik sejak berumur delapan tahun. Karena suka menyanyi, saya bernyanyi di dalam peti (*box*) dan mengangap seolah-olah bernyanyi di dalam studio radio. Dari situ, orang tua saya mengangap saya bisa bernyanyi dengan baik. Tetapi waktu itu saya tidak bisa bergabung dengan kelompok musik tertentu, karena saat itu sulit dan tidak banyak kelompok. Saya mulai naik panggung setelah memasuki usia 19 tahun, saat saya menjalani dinas militer Portugis dan bertugas di Oecussi pada 1960-an. Saya mulai naik panggung dengan kelompok musik koremetan kecil-kecilan di Oecussi jika ada pesta.

Setelah kembali dari Oecussi dan keluar dari dinas militer, saya bergabung dengan grup musik koremetan *Cinco de Oriente*. Kelompok ini paling terkenal pada 1960-an sampai tahun 1975. Ketika terjadi kebebasan politik di Timor Lorosae, kami menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Banyak pemuda-pemudi Fretilin pencipta lagu yang bergabung dalam grup kami. Kami menyanyikan lagu-lagu perjuangan ciptaan Abílio Araújo dan Francisco Borja da Costa. Waktu itu Francisco Borja da Costa adalah pencipta lagu dan puisi yang terkenal. Waktu militer Indonesia melakukan invasi, mereka membunuh teman saya ini. Invasi juga menghancurkan *Cinco de Oriente*.

Pada usia 21 tahun Chico Mau-Lohi

menikah dengan Maria Jaquelina Brito dan dikaruniai tiga orang anak. Waktu invasi 1975, Chico tidak sempat melarikan diri. Ia ditangkap tentara Indonesia di Bidau, ditahan di Tropical dan kemudian dijebloskan ke penjara Balide selama dua setengah tahun. Istrinya meninggal dunia ketika melahirkan anak ketiga, saat ia masih dalam penjara. Kemudian Chico Mau-Lohi menikah dengan Rosa Gama Lobo dan pasangan ini memperoleh enam orang anak.

Bagaimana riwayat pembentukan *Estrela do Mar*?

Setelah kembali dari Jakarta saya tetap menekuni hobi menyanyi. Saya bernyanyi untuk pesta-pesta koremetan dan acara-acara penting yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Saya sering mengikuti lomba, dan selama saya bersama teman-teman mengikuti lomba selalu juara. Waktu itu kelompok kami tidak punya nama. Pada Maret 1983 Kepala Desa Bidau mengatakan kepada kami bahwa kami bagus bermain musik dan lebih baik kalau membentuk satu grup musik. Ia berjanji membantu peralatan musik. Suatu hari kami empat orang bermain musik di pantai. Saat kami berenang saya melihat sesuatu yang saya tidak tahu namanya. Saya tertarik pada benda itu dan bertanya kepada teman-teman. Salah satu teman menyebutkan namanya "fitun tasi" (bintang laut). "Kalau begitu nama grup kita Bintang Laut," kata saya. Teman-teman setuju. Nama itu

cocok karena kami semua penduduk Bidau yang letaknya dekat pantai. Saya kemudian ke rumah kepala desa untuk memberitahukan nama grup kami. Kepala desa sangat menyetujuinya dan menunjukkan alat-alat musik yang sudah siap di gudang. Alat-alat musik bantuan pemerintah kepada setiap desa waktu itu. Sejak itu kami mulai latihan setiap hari. Pertama kali kami mengikuti lomba, peserta terdiri dari Lahane Grup, Abril Metan, Mandarin, dan lain-lain. Grup kami menjadi juara. Sejak itu kami dikenal oleh masyarakat sebagai kelompok musik koremetan terbaik. Kalau ada tamu penting pemerintah pendudukan Indonesia, kami yang diundang untuk menghibur.

Dalam grup dari dulu saya menjadi penyanyi, sekarang sekaligus jadi koordinator, Antonino memegang gitar dan menjadi juru bicara, Amandio gitar pengiring, Jorge ukulele, Antonio Lucas memegang mandolin, Maujo pada biola, Fernando pada bas. Setelah pulang mengungsi 1999, kami berkumpul kembali. Dengan alat musik apa adanya kami bermain lagi. Nama *Bintang Laut* kami ubah menjadi *Estrela do Mar*. Ini hanya perubahan bahasa, artinya sama.

Apa tujuan grup musik Anda?

Tujuan utama kami adalah menghibur. Sekarang menghibur masyarakat yang banyak stres karena tidak ada lapangan kerja dan sebagainya. Kelompok kami akan selalu memberikan semangat

orang ini kemudian hilang setelah bermain musik di Hotel Dili, 1979). Pemerintah Indonesia kemudian mengirim Chico ke Jakarta untuk belajar meteorologi. Selesai pendidikan ia dipekerjakan di Dinas Meteorologi sebagai pembantu pengamat cuaca sampai Indonesia pergi pada 1999.

Banyak orang yang beralih ke musik modern dari luar. Mengapa kelompok musik anda tetap mempertahankan musik koremetan?

Kami mempertahankan musik koremetan, bukan berarti kami tidak bisa memainkan musik modern. Koremetan adalah salah satu kebudayaan yang harus kita lestarikan. Kalau orang Timor Lorosae tidak melestarikan kebudayaan kita, siapa yang akan melakukannya? Sebagai penyanyi, saya bisa bernyanyi untuk musik apa saja. Tetapi yang penting bagi kami ialah menekuni yang kami sukai.

Di seluruh dunia, koremetan cuma ada di Timor Lorosae. Koremetan adalah budaya kita walaupun ada pengaruh dari musik *colica* dari Portugal. Seni musik kita yang asli adalah *bidu*, *tebe-tebe*, dan *dahur*. Musik asli ini kita dikembangkan dengan alat musik dari Barat sehingga menjadi satu jenis musik yang indah yang bernama koremetan. Koremetan adalah pengembangan musik tradisional kita yang dipadukan sedikit musik dari luar. Jadi kita tetap mempertahankan musik yang menjadi kebiasa-

an kita, tetapi tidak menutup kemungkinan perkembangan. Seni itu tidak berhenti pada yang kuno tetapi berkembang.

Kalau generasi muda menyukai musik modern dari luar, tidak masalah. Kita tidak bisa melarang orang. Saya yakin, generasi muda tidak pernah lupa dan tetap mengakui bahwa koremetan adalah miliknya. Pernah saya mendengar, ada pemuda yang adu mulut dengan orang asing karena orang asing itu menyebut koremetan seperti suara nyamuk. Para pemuda itu mengatakan, "Walaupun seperti suara nyamuk, itu milik kami!" Ini menandakan bahwa pemuda itu orang Timor Lorosae.

hidup dan memajukan bangsa. Untuk acara umum kami tampil gratis. Tetapi kami tidak mempunyai pekerjaan lain, maka kami sering dikontrak untuk bermain pada pesta pribadi dengan mendapatkan uang.

Visi kami adalah menyuarkan keinginan rakyat. Melalui musik kami menunjukkan keadaan rakyat di daerah. Pemerintah harus memperhatikan rakyat, kalau tidak dengan musik kita juga bisa melakukan protes. Ini adalah salah satu cara menyampaikan keinginan rakyat. Kami juga ingin menamatkan dan mempertahankan budaya, walaupun budaya itu berkembang.

Kepandaianya bernyanyi pernah menyelamatkan nyawanya. Pada 1978 ketika dalam penjara, tentara Indonesia membawanya keluar untuk dibunuh. Tetapi temannya yang menjadi pejabat pemerintah, Francisco Sena Barreto mengatakan kepada komandan tentara bahwa Chico adalah penyanyi. Sang komandan menyuruhnya menyanyi lagu "Bengawan Solo" dan "Sibu-Sibu." Chico menyanyi dengan baik. Ia pun dibebaskan. Begitu juga para anggota *Cinco de Oriente* yang lain, Manecas Exposto, Alito, dan Mino Alves (tetapi tiga



Francisco de Jesus Brito bersama putra bungsu. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Kesulitan apa saja yang Anda alami?

Banyak, terutama biaya. Alat musik kami terbatas, kalau salah satu rusak kami tidak bisa bermain musik. Ini kami atasi dengan kerja keras kelompok. Kalau mendapat uang dari bermain musik, sebagian kami gunakan untuk kebutuhan hidup pribadi, sebagian lagi kami tabung untuk keperluan membeli dan memperbaiki alat musik. Sampai sekarang kami belum pernah mendapat bantuan pemerintah. Pernah ada pejabat menyuruh kami membuat proposal. Setelah proposal kami serahkan, bantuan tetap tidak datang. ●



Kehidupan di Matebian. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

Distrik Matebian

Di kalangan masyarakat tertentu muncul ide untuk mendirikan distrik sendiri untuk empat sub-distrik yang selama ini masuk dalam wilayah distrik Baucau dan Viqueque. Mengapa?

Kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya di alam kemerdekaan ini semakin terbuka, situasi yang jauh berbeda dengan masa pendudukan. Ini merupakan konsekuensi logis dari proses demokratisasi yang tengah dibangun oleh segenap komponen bangsa ini.

Pada jaman pendudukan Indonesia meskipun pelaksanaan pemerintahan di daerah bersifat desentralisasi, tetapi dalam praktiknya justru sangat sentralistik. Sebab daerah hanya diberi wewenang yang sangat terbatas. Sementara proses pengambilan keputusan-keputusan strategis berada di tangan pemerintah pusat.

Di dalam Konstitusi RDTL pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerintah menghargai asas desentralisasi. Meskipun sejauh ini belum dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang operasional, tetapi hal ini telah mengisyaratkan agar pelaksanaan pemerintahan daerah di masa mendatang harus berlandaskan pada asas desentralisasi.

Karena dimungkinkannya setiap daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal tertentu, menyebabkan meningkatkannya keinginan masyarakat di sejumlah sub distrik untuk mendirikan distrik sendiri. Misalnya beberapa bulan yang lalu, sebagian besar masyarakat yang mendiami kaki pegunungan Matebian menyatakan tekadnya untuk mendirikan sebuah distrik dengan nama Distrik Matebian. Kelompok masyarakat itu berasal dari Sub-distrik Uatolari, Sub-distrik Uatocarabau (Distrik Viqueque), Sub-distrik Baguia dan Sub-distrik Quelicai (Distrik Baucau).

Keinginan untuk mendirikan distrik itu dibenarkan Agostinho

Guterres, salah seorang warga Suco Matahoi, Sub-distrik Uatolari. Ketika ditemui *Cidadaun* di Dili (29/08/02), ia mengatakan bahwa inisiatif itu merupakan aspirasi atau keinginan seluruh masyarakat. Menurutnya, ada beberapa alasan utama yang mendorong munculnya inisiatif itu. Pertama, dari segi geografis, letak keempat sub distrik itu katanya terpisah jauh dari ibukota Distrik Viqueque dan Distrik Baucau. Kedua, banyak terdapat kesamaan nama suco maupun adat istiadat masyarakat keempat sub distrik itu, yang menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya berasal dari satu garis keturunan. Faktor lain menurutnya, mereka memiliki sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi manusia maupun sumber alamnya.

Hal yang sama dikemukakan oleh Armindo Soares, warga Afoloicai, Sub-distrik Uatolari, Viqueque. Kepada *Cidadaun* ia mengatakan bahwa inisiatif itu sebetulnya muncul dari para pemimpin lokal, kemudian didukung oleh seluruh masyarakat. Ditanya sejauh mana kesiapan keempat sub-distrik itu untuk mendirikan Distrik Matebian, ia mengatakan bahwa mereka telah mengajukan proposal tertulis kepada Parlemen Nasional. "Tetapi hingga kini belum ditanggapi," katanya.

Keempat sub distrik itu, menurut Soares, memiliki sumber daya alam yang potensial. Sumber alam utama adalah minyak, gas, bahan pembuat semen, batubara, dan marmar. Hasil hutannya cendana, sedang perkebunan terdiri dari kelapa, kopi, kemiri, dan tebu. Hasil laut terdiri dari mutiara, batu lola, dan ikan. "Selain itu kami memiliki sumber daya manusia yang handal dan jumlahnya banyak," katanya mantap. ●

Kesulitan Para Petani

Para petani mengalami kesulitan mendapatkan bibit, pupuk, pestisida, dan peralatan pertanian. Produktivitas mereka pun terus menurun.

Kehidupan penduduk Timor Lorosae di pedesaan umumnya tergantung pada pertanian. Pembumihangusan 1999 telah menyebabkan hampir 70% lahan pertanian di pedesaan hancur. Meningkatnya kekerasan sebelum dan sesudah Referendum 1999, menyebabkan banyak penduduk sipil meninggalkan rumahnya untuk menyelamatkan diri ke tempat-tempat lain yang aman. Akibatnya banyak pula lahan pertanian penduduk yang ditinggalkan dan tidak diolah. Lahan-lahan pertanian itu secara bertahap mulai digarap kembali bersamaan dengan pulihnya situasi keamanan serta datangnya lembaga bantuan internasional.

Pada awal transisi banyak petani sudah bisa mengolah lahannya. Tetapi belakangan mereka kembali mengalami kesulitan. Maklum setelah kemerdekaan bantuan sangat berkurang. Di daerah tertentu para petani bahkan sama sekali tidak mendapatkan bantuan. Ternyata bantuan yang diberikan itu tidak membantu menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi, justru menciptakan ketergantungan di kalangan petani.

Kesulitan paling dialami oleh para petani yang telah terbiasa dengan cara bertani yang diperkenalkan oleh pemerintah pendudukan Indonesia. Program pertanian pemerintah Indonesia itu mengandalkan pada bibit hibrida, pupuk kimia

an saya tidak meningkat," katanya.

Menurutnya, memang sejumlah organisasi non-pemerintah pernah memberikan bantuan peralatan pertanian seperti cangkul, linggis, sabit, dan parang. Tetapi peralatan itu tidak bertahan lama. "Pemerintah distrik sudah menjanjikan untuk membantu kami, tetapi hingga kini belum dipenuhi," tambahnya. Walaupun demikian, menurutnya, masyarakat di wilayahnya tetap bekerja tanpa kenal lelah.

Hal yang sama diungkapkan oleh Arlindo dos Santos, petani desa Memo, Maliana. "Kami membersihkan kebun dan sawah dengan peralatan apa adanya," katanya. Menurutnya, alat yang digunakan setelah Indonesia pergi adalah sisa cangkul yang sudah berkarat akibat kebakaran ketika terjadi kekerasan 1999. "Sebenarnya cangkul itu tidak layak lagi digunakan, tetapi apa boleh buat? Keadaan yang mengharuskan demikian," keluh Arlindo dos Santos.

Untuk mengolah tanah, menurut Arlindo, para petani kesulitan karena tidak ada sapi, kerbau atau traktor. "Di wilayah ini [Memo, Red.] hanya ada sebuah traktor, tetapi kondisinya sangat memprihatinkan," katanya. Ia juga mengatakan bahwa kesulitan yang dihadapi para petani di daerahnya sebetulnya sudah dilaporkan ketika pemerintah transisi UNTAET masih berkuasa. Tetapi tidak pernah menda-



Petani Hudilaran, Bairro Pite, sedang membersihkan kebunnya. Foto: Rogério Soares/Cidadaun

dan pestisida kimia dari luar yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Penggunaan input pertanian seperti itu memang meningkatkan produktivitas.

Sekarang input pertanian ini sulit diperoleh. Kalau pun ada harganya mahal sekali. Menurut pengamatan *Cidadaun*, hal ini menyebabkan banyak petani yang mulai meninggalkan lahan garapannya. Ada yang kemudian mencari mata pencaharian lain. Pertanian seolah tidak lagi memberikan harapan hidup.

Terbatasnya bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida kimia menyebabkan penurunan terus-menerus produktivitas pertanian. Jaime Bere, petani asal desa Ritabou, Maliana, ketika ditemui *Cidadaun* mengungkapkan bahwa untuk mengolah ladang dan sawahnya, ia terpaksa menggunakan peralatan apa adanya. "Terbatasnya peralatan itu menyebabkan hasil pertani-

pat tanggapan positif sampai dengan berakhirnya transisi.

"Saya sendiri mendapat bantuan kredit sebuah traktor dari Yayasan ETADEP. Saya menggunakannya dengan sangat hati-hati agar tidak rusak. Sebab suku cadangnya sangat mahal dan sulit mendapatkannya," ungkap dos Santos. Tetapi traktor tersebut belum cukup untuk mengolah lahannya yang begitu luas. Pengolahan lahan dengan peralatan yang sangat terbatas menyebabkan hasil produksi pun tidak optimal. "Hasilnya hanya untuk mencukupi kebutuhan keluarga," jelas dos Santos.

Seandainya hasil produksi cukup untuk dijual, masih ada hambatan lain, yaitu transportasi. "Karena transportasi masih jarang, kami tidak bisa memasarkan hasil pertanian," kata Jaime Bere. ●

Jaime Soares & Rogério Soares

Persoalan sosial dan ketimpangan di Brazil sepertinya mustahil diatasi. Tetapi negeri raksasa Amerika Selatan ini sekarang menjadi pelaku "transfer teknologi sosial" untuk pemberantasan kemiskinan, khususnya yang menguntungkan anak-anak.

Brazil Mengekspor Program untuk Anak-anak

Organisasi non-pemerintah yang dibentuk oleh Konferensi Nasional Uskup Brazil, Pastoral da Criança oleh pemerintah Brazil dicalonkan untuk mendapatkan Penghargaan Nobel Perdamaian. Sebabnya, organisasi ini berhasil mengurangi tingkat kematian bayi di kampung-kampung tempatnya berkarya dari 29 per 1000 kelahiran menjadi 13. Organisasi ini juga meluaskan aksinya ke negeri-negeri lain.

Rendahnya biaya dan tingginya efektivitas metodologi kerja yang dikembangkan oleh Pastoral da Criança menjadikannya alat yang ideal untuk memberantas kematian bayi dan kekurangan gizi anak-anak di kampung-kampung dan negara-negara miskin. Biaya untuk tiap anak, menurut Koordinator Nasional Pastoral da Criança Dokter Zilda Arns Neumann kepada IPS, hanya setengah dolar per bulan. Rendahnya biaya ini

karena pelayanan kesehatan dilakukan oleh orang-orang yang tidak dibayar atau pekerja sukarela, makanan yang diberikan berharga murah tetapi bergizi tinggi, dan program sentral penyebaran informasi dan mobilisasi masyarakat.

Karena keberhasilan organisasi ini, Zilda Arns baru-baru ini dipilih menjadi Pahlawan Kesehatan Masyarakat, salah satu penghargaan yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Pan-Amerika. Dengan pengakuan ini, Zilda Arns berharap bahwa strategi Pastoral da Criança bisa menjadi dasar bagi "program global" yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah negeri-negeri lain.

Program ini dimulai 1983 ketika Zilda Arns mulai melancarkan "upaya terencana" di Florestópolis, kota miskin di negara bagian Paraná. Saat itu, 72 persen dari 14.700 penduduk hidup dari pe-



Kesehatan anak-anak menentukan kemajuan bangsa. Foto: Carlito Caminha

kerjaan musiman pertanian. Dalam tempo satu tahun, program ini berhasil menurunkan tingkat kematian bayi dari 127 per 1000 menjadi 28 per 1000 kelahiran. Setiap satu anak laki-laki dan perempuan didampingi oleh pekerja sukarela yang telah dilatih, yang oleh Pastoral da Criança disebut "pemimpin kampung." Kekurangan gizi juga menurun tajam. Dengan keberhasilan ini, program diperluas ke wilayah-wilayah lain dan mendapatkan bantuan dari Konferensi Uskup Nasional serta Dana Anak-anak PBB (UNICEF). Sekarang, organisasi ini bekerja dengan 155.000 pekerja sukarela yang bekerja di 64 dari 5.560 distrik seluruh Brazil dan mengurus 1,64 juta anak, dari bayi yang baru lahir sampai anak berusia

enam tahun. Mereka juga bekerja sama dengan orang dewasa dalam program alfabetisasi dan membantu orang lanjut usia.

Baru-baru ini dokter Zilda Arns mengunjungi Angola untuk memperkuat program yang dijalankan di sana sejak 1996. Di negeri Afrika ini Pastoral telah melatih lebih dari 700 pemimpin kampung yang bertanggungjawab atas kesehatan lebih dari 7000 anak.

Selain di Angola, Pastoral da Criança melancarkan program di Guiné-Bissau, Moçambique, Paraguay, Argentina, Bolivia, Peru, dan Venezuela, dan Filipina. Di Timor Leste, sejumlah suster Brazil menjalankan program Pastoral da Criança, dari pangkalan mereka Dili dan Laleia. ●

Nug Katjasungkana (sumber: IPS)

Perdagangan Mendominasi Investasi

Jenis investasi belum mengalami banyak perubahan setelah Timor Lorosae merdeka. Yang terbesar adalah di bidang perdagangan.

Perdagangan mendominasi investasi di Timor Lorosae. Demikian keterangan Sekretaris Negara Urusan Perdagangan dan Industri Arlindo Rangel kepada Nuno Hanjam dan Rogério Soares dari *Cidadadaun*. Kegiatan mereka adalah melakukan impor barang dari luar negeri untuk dijual di Timor Lorosae.

Sampai sekarang, perusahaan yang sudah terdaftar sekitar 6000, termasuk milik pengusaha lokal. Pengusaha asing yang masuk berasal dari Australia (35,7%), Indonesia (23%), Singapura (11,5%), Portugal (6%), Malaysia (5,3%), dan Cina (4,3%).

Menurutnya, investor yang masuk adalah kelas menengah ke bawah. "Sampai sekarang belum ada investor yang mendirikan pabrik. Memang sudah ada yang menawarkan membangun pabrik, seperti pabrik ikan, pabrik barang elektronik. Ada pula yang menawarkan membuka usaha *packing* (pengemasan) barang-barang untuk ekspor. Tetapi mereka masih menunggu regulasi yang mengatur investasi," katanya.

Kenaikan pajak yang baru dilakukan oleh pemerintah, menurut Arlindo Rangel, tidak berpengaruh pada tingkat investasi. "Di Timor Lorosae ini investor asing menengah dan atas belum bisa melakukan aktivitas, karena belum adanya regulasi. Sekrang kami sedang mempersiapkan rancangan regulasi yang kemungkinan sudah bisa diserahkan kepada Parlemen Nasional pada awal tahun 2003," ungkapnya.

Karena belum ada peraturan perundang-undangan, pemerintah belum melakukan kontrol dan pembatasan terhadap investor yang masuk. "Setelah ada undang-undang investasi dan peraturan kegiatan komersial, kita akan lihat siapa yang bisa mengeksport dan mengimpor barang. Kita harus mengontrol operasi mereka di lapangan. Kalau membuka usaha mereka harus mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait. Tidak seperti masa transisi dulu, penguasah datang hanya mendaftarkan diri, tetapi tidak ada



Penggilingan batu di Ulmera, Liquiça. Foto: Rogério Soares/Cidadadaun

konsultasi dan rekomendasi. Tiba-tiba kita lihat ada hotel dan sebagainya. Untuk sementara ini yang berlaku adalah Regulasi UNTAET No.4/2000," papar Arlindo Rangel.

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Direktur Investasi dan Pariwisata Francisco dos Reis mengatakan bahwa setelah 20 Mei banyak pengusaha yang datang ke kantornya hanya untuk konsultasi. "Mereka datang untuk mendaftarkan diri untuk membuka usahanya. Ada yang mendaftar hanya agar bisa mengikuti tender," katanya. Meskipun demikian, pengusaha yang datang hanya untuk mendaftarkan diri itu juga dilayani. "Nanti kalau mereka sudah mau memulai kegiatan usaha, harus memberitahukan kepada pihak kami," Francisco dos Reis.

Mereka yang mendaftar ini diminta untuk membuat pro-

posal tentang usaha yang mau mereka jalankan. Proposal yang disampaikan akan diperiksa dan dikonsultasikan dengan instansi lain yang terkait, seperti Land and Property atau Unit Perlindungan Lingkungan Hidup. Konsultasi itu tujuannya untuk menjamin agar kegiatan bisnis bisa berjalan sebaik-baiknya. "Agar di kemudian hari tidak terjadi masalah. Kita harus mengikuti perkembangan. Terutama status tanah masih banyak masalah. Banyak tanah yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di luar negeri. Sehingga sering terjadi sengketa tanah karena ada berbagai pihak mengklaim tanah yang sama sebagai miliknya," tambahnya. Yang juga harus diperhatikan adalah lingkungan hidup. Kita harus hati-hati agar investor yang datang tidak merusak lingkungan. ● Rogério Soares

Nilai Budaya Karau Timor

Kerbau atau karau Timor sangat penting perannya dalam upacara-upacara adat. Nilainya terletak pada panjang-pendek tanduknya bukan besar badannya. Gengsi keluarga ditentukan oleh panjangnya tanduk kerbau yang diberikan dalam upacara-upacara adat.



Karau Timor: nilainya terletak pada tanduknya. Foto: Mariano Ferreira/Cidadaun

Jauh sebelum kedatangan bangsa Portugis maupun sesudahnya, kerbau memiliki nilai yang terbilang cukup tinggi dari segi budaya. Tetapi belakangan nilai kerbau tampak semakin mengalami penurunan, bahkan di sejumlah daerah dapat dikatakan telah hilang sama sekali. Dalam perspektif adat Timor Lorosae, kerbau yang dalam bahasa Tetun disebut *karau Timor* atau *karau metan*, memiliki nilai ekonomis jauh lebih tinggi dibanding sapi, yang dalam bahasa Tetun disebut *karau baka*.

Fungsi kedua hewan ini berbeda. *Karau baka* selain untuk dikonsumsi dagingnya, juga biasanya digunakan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Sedangkan *karau Timor* hampir jarang digunakan untuk membajak sawah dan menarik gerobak karena dinilai memiliki keistimewaan tersendiri secara adat. Keluarga yang memiliki *karau Timor* dalam jumlah banyak umumnya dianggap sebagai kalangan berada. Lagi pula untuk urusan adat *karau Timor* dianggap memiliki posisi tawar yang kuat dalam hubungan *fetosan-umane*. Tak hanya itu, *karau Ti-*

mor juga biasanya digunakan pada acara persembahan kurban bagi para leluhur (*Istilu*).

Untuk acara adat *Istilu* dan acara ritual di tempat-tempat yang dikeramatkan, diharuskan untuk membawa *karau Timor* jantan dengan tanduk yang panjang. Tidak dianjurkan untuk membawa *karau Timor* betina. Ada aturan khusus yang berlaku dalam setiap adat menyangkut kurban dalam *Istilu*. Adalah pantangan kalau pihak *fetosan* (keluarga mempelai perempuan) memberikan seekor *karau Timor betina* untuk *umane* (keluarga mempelai laki-laki).

Karau Timor dianggap sebagai hewan yang keramat (*Julik*). Karena itu fungsinya lebih untuk acara adat seperti *fetosan-umane*, bukan untuk menarik gerobak. *Karau Timor*, juga berfungsi untuk *barlaque* (mas kawin) dalam peminangan. Ini adalah tradisi yang berlaku di seluruh wilayah Timor Lorosae, walaupun ada perbedaan di tempat-tempat tertentu.

Kadangkala dalam menentukan berapa banyak *karau Timor* yang harus diberikan pihak *umane* kepada *fetosan* dalam menjalin relasi *fetosan-*

umane jumlahnya bervariasi. Akan lebih berbeda lagi kalau yang menjalin kekerabatan adalah golongan *liurai* atau *dato* dan *chefe suco*. Hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan adat yang harus dipenuhi oleh orang tua laki-laki dari golongan *liurai*, yang sekaligus untuk memantapkan kewibawaan mereka di mata rakyat yang menjadi bawahan mereka.

Untuk mengukur seberapa besar nilai pemberian yang diberikan dalam acara-acara adat seperti pernikahan dan *Istilu*, yang menjadi ukuran adalah panjangnya tanduk bukan besarnya badan *karau metan*. *Karau* dengan tanduk panjang menunjukkan tingginya martabat keluarga yang memberikannya. Anggota keluarga yang memberikan *karau* tanduk panjang akan dilayani secara istimewa selama upacara adat berlangsung.

Dalam acara adat peminangan, pemberian *karau metan* tergantung pada permintaan dari keluarga perempuan dan tergantung pada perundingan yang dilakukan oleh seorang juru bicara tokoh adat (*Manu Ain*). Apabila seorang *Manu Ain* lemah dalam menafsir-

kan setiap istilah yang disampaikan oleh juru bicara dari pihak keluarga calon istri, kemungkinan calon *mane foun* (menantu laki-laki) bisa diminta untuk menyediakan banyak *karau metan* sebagai *barlaque*.

Namun khusus untuk acara *Istilu*, tidak ada kesempatan tawar menawar, terutama yang berkaitan dengan berapa ekor *karau metan* yang diminta oleh pihak *umane*. Kegiatan *Istilu* memiliki syarat baku. Kewajiban dalam *Istilu* adalah puncak dari tanggungjawab seorang *fetosan* kepada *umane*-nya, berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh tetua adat (di Viqueque disebut *Bahen*). *Istilu* juga menjadi semacam sarana keluarga-keluarga yang terlibat untuk memamerkan kebesaran dan kemampuannya.

Dengan demikian nilai seekor *karau metan* atau *karau Timor* dalam kebudayaan Timor Lorosae merupakan tolok ukur untuk menunjukkan mampu atau tidaknya suatu keluarga dalam memenuhi permintaan adat yang merupakan bagian dari tanggungjawabnya kepada para leluhur. ●

Nuno Hanjan & Julino Ximenes

Sosialisasi Dan Konsultasi Komisi Regional

Rekonsiliasi komunitas mulai dijalankan antara pelaku dan korban kekerasan 1999 di Liquiça.

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi telah memulai fasilitasi rekonsiliasi komunitas. Acara yang diselenggarakan di Suco Maumeta, Liquiça pada 24 Agustus ini berupa rapat komunitas yang dihadiri oleh masyarakat setempat.

Rekonsiliasi dilakukan antara tiga orang mantan anggota milisi pro-otonomi Besi Merah Putih, yaitu Cancio dos Santos, Saturnino Alves Correia dan Laurindo Alves Correia dengan para korban kekerasan dan masyarakat setempat.

Acara ini dimulai dengan pembacaan oleh panel Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi keputusan Jaksa Agung RDTL tentang dilakukannya proses rekonsiliasi komuni-

tas terhadap tiga pemohon yang meminta diadakannya rekonsiliasi dengan para korban. Panel ini dipimpin oleh Ana Maria de Jesus dos Santos (Komisaris Regional Liquiça).

Kemudian dilanjutkan dengan dengar pendapat dari para pelaku kekerasan, yaitu pengakuan kesalahan kepada masyarakat, terutama kepada pelaku. Pada prinsipnya mereka mengatakan bahwa mereka melakukan kekerasan bukan atas kemauan sendiri, tetapi karena dipaksa oleh tentara Indonesia. Walaupun demikian, mereka mengaku bersalah dan meminta maaf atas semua tindakan mereka kepada para korban. Mereka juga berjanji bahwa di masa yang akan datang tidak akan melakukan kekerasan un-



Suasana rekonsiliasi komunitas, Maumeta, Liquiça. Foto: Rogerio Soares/Cidadaun

tuk menyelesaikan masalah di tengah masyarakat.

Setelah mendengarkan pengakuan para pelaku, pendapat korban dan masyarakat umum, rapat komunitas ini mencapai kesepakatan bahwa para pelaku tidak dikenai sanksi apa pun. Acara rekonsiliasi ini diakhiri dengan jabat tangan menandai perdamaian, dalam suasana ritual adat masyarakat setempat.

Rekonsiliasi komunitas adalah salah satu cara penyelesaian untuk kekerasan 1999. Jenis kejahatan yang bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi komunitas adalah yang menurut ketentu-

an tidak termasuk tindakan yang digolongkan sebagai "kejahatan berat."

Sementara itu, KPKR telah selesai melakukan sosialisasi dan konsultasi di 13 distrik. Hasilnya telah disampaikan kepada Komisi Nasional untuk dievaluasi dan untuk menentukan tindak lanjutnya. Saat ini komisi-komisi regional sedang menyelenggarakan kegiatan pencarian kebenaran di tingkat sub-distrik. Di satu sub-distrik komisi regional bekerja selama tiga bulan. ●

Rubrik ini dikelola oleh Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) Timor Lorosae.